

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=417444&val=8102&title=PENERAPAN%20METODE%20PROSES%20PRODUKSI%20DALAM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20UNTUK%20PERLINDUNGAN%20LINGKUNGAN%20DAN%20KESEHATAN>

PENERAPAN METODE PROSES PRODUKSI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN

APPLICATION OF PROCESS PRODUCTION METHOD IN TRADE FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AND HEALTH

Sri Wartini, and Risky Edy Nawawi

Fakultas, Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, email: sri.wartini67@yahoo.com
danriskymickey@gmail.com

Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (JUNI 2015) page. 16
Publisher: Jurnal Media Hukum

DOI: 10.18196/jmh.2015.0047/ 57-72

ABSTRACT

*Processes and Production Methods (PPMs) are the subject of one of the most complicated controversies in the debate over international trade and protection of the environment and human health. The issue of PPMs actually is not prohibited under the WTO system. There are some cases which may become evident to prove that PPMs is permissible in WTO system. **However, PPMs for some reasons can be used as a tool of disguise protectionism by the developed countries.** Unfortunately, a developing country finds difficulty to challenge it. The article emphasizes in a weighty examination of the two issues, namely: (i) What are the justifications of process and production method (PPMs) to implement in international trade? (ii) What are the legal implication of PPMs in international trade to the protection of the environment and the human health? The research method is qualitative and the approach of the research is normative. The research finds that the implementation of PPMs to some extent are justifiable in international trade to the extent that comply with the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.*

[...]

pp. 67-69

C. Implikasi Hukum Penerapan PPMs dalam perdagangan internasional untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan

Perdagangan internasional dapat mempengaruhi perlindungan lingkungan dan kesehatan bagi suatu negara, tinggal bagaimana negara tersebut memanfaatkan ketentuan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingannya. WTO system menyediakan peraturan yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif perdagangan internasional. Salah satunya adalah penerapan PPMs dalam perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa implikasi hukum penerapan PPMs terhadap perlindungan lingkungan dan kesehatan suatu negara.

Pertama, PPMs dapat digunakan oleh negara untuk melindungi lingkungan dan kesehatan dengan cara memasukkan kebijakan lingkungan atau aturan PPMs terhadap masuknya suatu produk ke negara yang bersangkutan. Misalnya dengan penerapan standar lingkungan yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk memasuki pasar suatu negara. Ketentuan ini memang dapat mempengaruhi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan perlindungan lingkungan dan perdagangan internasionalnya. Bisa saja sebuah negara mengeluarkan standar lingkungan yang rendah untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif (*competitive advantage*), akan tetapi negara tersebut lingkungan dan kesehatan warganya akan terancam.

Namun demikian, berdasarkan teori keunggulan kompetitif menjadikan negara lebih efisien dalam penggunaan sumber alam, sehingga akan dapat menghemat sumber alam dan mengurangi limbah. Selain itu dengan penerapan PPMs dalam perdagangan internasional akan dapat mempromosikan mendorong digunakannya teknologi yang ramah lingkungan, misalnya juga bahwa PPMs ini dapat dalam bentuk labeling ataupun persyaratan standarisasi, seperti sertipikat ISO seri 14020 tentang penggunaan eco-labeling (Erik P. Bartenhagen, 1997: 59).

Kedua, PPMs sebagai instrumen perdagangan internasional, dapat mempengaruhi kebijakan perlindungan lingkungan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh negara, misalnya produk udang Indonesia untuk masuk pasar Eropa, udang tersebut tidak boleh mengandung residu mercury, maka dengan terpenuhinya standar tersebut yang juga diterapkan untuk pasokan dalam negeri maka akan menjadi pemicu yang baik bagi peningkatan kesehatan masyarakat, karena mereka mengkonsumsi produk yang aman bagi kesehatan. Jadi ada dua keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara. Disatu sisi, negara tersebut dapat mencegah masuknya produk yang membahayakan bagi kesehatan, dan kedua kebijakan tersebut akan dapat menjadi instrumen yang handal bagi perlindungan kesehatan, asal saja ini tidak dijadikan perlindungan terselubung bagi produk domestic (Sanford Gaines, 2001: 743-744).

Partner dalam perdagangan internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dalam perlindungan lingkungan dan perlindungan kesehatan. Hal ini tergantung pada *political will* masing-masing negara sebagaimana dimuat dalam *preamble* perjanjian internasionala pendirian WTO dalam *Marrakesh Agreement* menjelaskan bahwa antara lingkungan dan perdagangan internasional itu saling mendukung (*mutually supportive*) sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hubungan timbal balik yang saling mendukung antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi harus diusahakan antar negara. Sehingga kalau masing-masing negara memiliki kebijakan perdagangan yang *synergy* dengan perlindungan lingkungan, maka perdagangan internasional akan terjadi keberlanjutan, karena lingkungannya tidak rusak.

Ketiga, penerapan PPMs akan dapat terlaksana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional, kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional baik itu yang diatur dalam *GATT*, *Sanitary and Phytosanitary Agreement* serta dalam *TBT Agreement*. Harus disadari bahwa dampak lingkungan yang disebabkan oleh perdagangan suatu produk sebetulnya merupakan integrasi tiga aspek, yaitu : "*scale, composition, and distribution*" (Stanford E. Gaines, 2003, 324-325). *Scale* merujuk kepada jumlah atau volume perdagangan suatu produk yang mencerminkan jumlah konsumsi suatu produk. Secara internasional yang menghabiskan berbagai macam sumber alam,

seperti kayu, ikan ataupun supply air bersih. Composition berarti merujuk kepada efek lingkungan suatu produk yang diasosiasikan dalam produk yang diperdagangkan, misal perdagangan minyak dan perdagangan kapas masing-masing memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Sedangkan distribution mengindikasikan siapa berdagang dengan siapa, akan mempengaruhi juga terhadap kebijakan perlindungan lingkungan dan perlindungan kesehatan.

Masyarakat internasional terbagi dalam polarisasi kelompok negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang. Negara maju sering melakukan proteksi terselubung untuk melindungi kepentingannya, sementara negara berkembang dan kurang berkembang berjuang untuk menjadi negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini, negara maju dalam rangka melindungi kepentingan ekonominya membuat suatu standar lingkungan yang tinggi, sehingga sulit bagi negara berkembang untuk memenuhi standar tersebut, dan akhirnya produk negara berkembang maupun kurang berkembang tidak dapat memasuki pasar negara maju. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan dalam bentuk *PPMs* yang dilakukan oleh negara maju atau negara yang memiliki akses pasar yang lebih luas pada produk yang akan masuk ke negaranya. (Charles Benoit, 2011: 588-589).

Keempat, *PPMs* sebagai salah satu instrumen yang dipromosikan oleh WTO dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan adanya pengawasan dari WTO dalam pelaksanaannya. WTO sebagai pembuat peraturan (regulator) dalam perdagangan internasional melalui GATT memiliki berbagai cara untuk mempromosikan perdagangan internasional. Beberapa penulis menyatakan bahwa WTO seperti macan yang tidak punya gigi, namun demikian GATT telah berhasil mengatur tentang penerapan "*concepts of most favoured nation and of like product*" (Gabrielle Marceau, 2013: 4-5) dan beberapa pengecualian prinsip perdagangan internasional yang dimuat dalam GATT Pasal XX untuk mencapainya.

PPMs merupakan ketentuan yang dibuat oleh WTO yang begitu banyak mengundang kritik, bahkan sering dikatakan bahwa WTO menolak penerapan *PPMs*, padahal sebetulnya tidaklah begitu. WTO justru memberikan fleksibilitas untuk penerapan *PPMs* dengan suatu kondisi dan persyaratan tertentu yang sudah dituangkan dalam *GATT*, *SPS Agreement* maupun *TBT Agreement*. **WTO menegaskan bahwa *PPMs* bukanlah berakar dari usaha untuk memproteksi industry dalam negeri, karena penerapannya tidak boleh melanggar prinsip national treatment dan most favoured nation (Lawrence A. Kogan, 2013: 508-509)**

Situasi ini menjadi rumit bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan *PPMs*. Oleh karena itu diperlukan adanya pedoman (guideline) yang dibuat oleh WTO untuk memudahkan negara berkembang mengikuti peraturan tersebut dan terjamin adanya transparansi peraturan yang dibuat oleh negara maju, sehingga negara berkembang mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara maju dan dapat mengakses pasar negara maju. [...]

C. Legal Implications Implementation of *PPMs* in international trade for the Protection of the Environment and Health

International trade can affect the environment and health protection for a nation, just how they take advantage of Negar international trade provisions to protect its interests. WTO system provides rules that can be used by countries to protect the environment and human health from the negative effects of international trade. One is the application of *PPMs* in international trade. Here is some of the legal implications of the application of *PPMs* to environmental protection and health of a country.

First, PPMs can be used by countries to protect the environment and health by introducing PPMs environmental policy or rule against the introduction of any product to the country concerned. For example, by the application of environmental standards that must be met by a country to enter the market of a country. This provision can indeed affect the sovereignty of the state in determining the policy of environmental protection and international trade. It could be a state-issued low environmental standards to gain competitive advantage (competitive advantage), but the country's environment and the health of its citizens would be threatened.

However, based on the theory of competitive advantage making the state more efficient use of natural resources, so it will be able to save natural resources and reduce waste. Besides it with the application of PPMs in international trade will be able to promote encourage the use of environmentally friendly technologies, for example also that PPMs can be in the form of labeling or standardization requirements, such as the certificate ISO 14020 series on the use of eco-labeling (Erik P. Bartenhagen, 1997: 59).

Second, PPMs as an instrument of international trade, may affect the environmental protection policy and health issued by the state, such as shrimp products Indonesia to enter the European market, the shrimp should not contain residues of mercury, then by fulfilling these standards are also applied to the domestic supply, the would be a good trigger for improvement of public health, because they consume a product that is safe for health. So there are two advantages gained by a country. On one hand, the country can prevent the entry of products harmful to health, and the two policies will be able to be a reliable instrument for the protection of health, saj origin is not used as disguised protection to domestic products (Sanford Gaines, 2001: 743-744).

Partner in international trade can affect the behavior of the state in environmental protection and health protection. It depends on the political will in each country as stipulated in the treaty preamble international establishment of the WTO in Marrakesh Agreement explains that between the environment and international trade are mutually supportive (mutually supportive) as described above. Mutual relationship of mutual support between international trade and environmental protection does not happen automatically, but must be sought between countries. So that each country has a trade policy that synergy with the protection of the environment, the sustainability of trade international will happen, because the environment is not damaged.

Third, the application of PPMs will be impossible and not in conflict with the provisions of international trade, if carried out in accordance with applicable regulations in international trade was regulated in GATT, Sanitary and Phytosanitary Agreement and the TBT Agreement. It must be realized that the environmental impact caused by trade a product is actually the integration of the three aspects, namely: "scale, composition, and distribution" (Stanford E. Gaines, 2003, 324-325). Scale refers to the number or volume of trading a product which reflects the amount of consumption of a product. Internationally spending a wide variety of natural resources, such as timber, fish or clean water supply. Composition means refers to a product's environmental effects associated in traded products, eg oil trade and trade of cotton each have different environmental impacts. While distribution indicates who traded with whom, will affect also the policies of environmental protection and health protection.

The international community is divided into group polarization developed countries, developing countries and least developed countries. Developed countries often disguised protectionist measures to protect its interests, while developing and less developed countries struggling to become a developed country and a developing country. In this context, the developed countries in order to protect its economic interests to make a high environmental standards, making it difficult for developing countries to meet those standards, and ultimately product developing and less developed countries are not able to enter the markets of

developed countries. It can be found in a variety of policies in the form of PPMs undertaken by developed countries or countries that have wider market access to products that will go into the country. (Charles Benoit, 2011: 588-589).

Fourth, PPMs as one instrument promoted by the WTO in order to realize sustainable economic growth requires the supervision of the WTO in its implementation. WTO as a regulator (regulator) in international trade through GATT have a variety of ways to promote international trade. Several authors state that the WTO is like a tiger that has no teeth, however, GATT has successfully set about applying "concepts of most favored nation and of like product" (Gabrielle Marceau, 2013: 4-5) and some exceptions principles contained in international trade GATT Article XX to achieve its objectives.

PPMs are provisions made by the WTO so much criticism, even often said that the WTO rejected the application of PPMs, when in fact it is not so. WTO it gives flexibility to the application of PPMs with certain conditions and requirements that have been contained in the GATT, the SPS Agreement and the TBT Agreement. WTO confirms that the PPMs is not rooted in an attempt to protect the domestic industry, since its application should not be melanggar principle of national treatment and most favored nation (Lawrence A. Kogan, 2013: 508-509)

The situation has become complicated for developing countries to be able to meet the requirements of PPMs. Therefore, it is necessary to guidelines (guidelines) made by the WTO to enable developing countries to follow the regulations and secure the transparency regulations made by the developed countries, so that the developing countries were able to meet the requirements specified by the developed countries and can access the markets of developed countries.

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAPHY

[...]

Kogan Lawrence A., 2013, "Reach Revisited: A Framework for Evaluating Whether a Non-Tariff Measure Has Matured Into an Actionable Non-Tariff Barrier to Trade", Am. U. Int'l L. Rev., Vol, 28.

Hawkins Slayde, Spring 2008, "Skirting Protectionism: A GHG-Based Trade Restriction Under the WTO", Geo. Int'l Envtl. L. Rev., Vol, 20.

Lane Katie A., Winter-Spring 2001, "Protectionism Or Environmental Activism? The Wto As A Means Of Reconciling The Conflict Between Global Free Trade And The Environment", U. Miami Inter-Am. L. Rev, Vol. 32.

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement